



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
Jl. Jenderal A. Yani No. 58-Bypass Cempaka Putih Timur  
JAKARTA PUSAT

Jakarta, 13 Februari 2018

Nomor : 198/DJU/KU.04.2/2/2018  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Permintaan Dokumen

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia  
Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Di\_ Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 91/SEK/KU.00/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan memperhatikan Surat Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 02/LK-MA/02/2018 tanggal 9 Februari 2018 hal seperti pada pokok surat, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memenuhi permintaan dokumen tersebut. Dokumen yang kami butuhkan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP Lainnya pada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang berada dibawah Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana surat terlampir.

Adapun dokumen yang dibutuhkan antara lain :

1. Laporan keadaan perkara pada Pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding Tahun 2016 dan 2017 , sesuai format terlampir (**Lampiran 1**);
2. Rincian keuangan perkara (biaya pendaftaran dan hak redaksi) di pengadilan tingkat pertama (gugatan, permohonan, eksekusi, banding, kasasi, peninjauan kembali) dan pengadilan tingkat banding Tahun 2016 dan 2017, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran Tahun 2016 yang belum disetor ke Kas Negara pada tahun 2016 (**Lampiran 2**);
  - b. Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran Tahun 2017 yang belum disetor ke Kas Negara pada tahun 2017 (**Lampiran 3**);
  - c. Jumlah PNBP Hak Redaksi Tahun 2016 yang belum disetor ke Kas Negara pada Tahun 2016 (**Lampiran 4**);
  - d. Jumlah PNBP Hak Redaksi Tahun 2017 yang belum disetor ke Kas Negara pada Tahun 2017 (**Lampiran 5**);
3. Rekapitulasi sisa panjar biaya perkara di pengadilan tingkat pertama yang belum dikembalikan kepada pihak yang berperkara/belum disetorkan ke kas Negara sampei dengan 31 Desember 2017, sesuai format terlampir (**Lampiran 6**);
4. Total perkara eksekusi sampai dengan 31 Desember 2017 yang belum diperhitungkan sisa panjar biaya perkaranya dan belum dikembalikan ke pihak berperkara/ke kas Negara, sesuai format terlampir (**Lampiran 7**);

5. PNBP Lainnya di pengadilan tingkat pertama tahun 2016, namun disetorkan ke kas Negara pada tahun 2017, sesuai format terlampir (**Lampiran 8**);
6. PNBP lainnya di pengadilan tingkat pertama tahun 2017, namun belum disetorkan ke kas Negara pada tahun 2018, sesuai format terlampir (**Lampiran 9**).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini diinstruksikan agar Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk duduk bersama mengkoordinasikan antara bagian kepaniteraan dan bagian kesekretariatan untuk menyelesaikan permintaan dokumen tersebut. Mengingat pentingnya dokumen tersebut kami harapkan dokumen diterima **paling lambat pada tanggal 20 Februari 2018** melalui email : [keuanganbadilum@gmail.com](mailto:keuanganbadilum@gmail.com) dengan tembusan ke Mahkamah Agung RI cq Bagian PNBP Biro Keuangan alamat email : [keuangan.pnbp@yahoo.co.id](mailto:keuangan.pnbp@yahoo.co.id) dengan subyek keterangan: umum\_namasatker\_nama wilayah/pt\_dok.bpk (contoh: umum\_pn.jabar\_jabar\_dok.bpk). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi bagian keuangan contact person :

1. Lilies Ainany,SE,MM : 081911119009
2. Puji Mulyani, SE : 081 330663344 – WA : 087875075382
3. Ati Apriyani, S.Si : 085772772736
4. Wikan Santoso, S.Kom : 08111075701

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM



**Dr. HERRI SWANTORO, SH.MH.**  
NIP.19590904 198403 1 004

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Adminitrasi Mahkamah Agung RI;

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian 1-9 dokumen :

1. Laporan dikirimkan dengan format excel dan pdf (setelah di tanda tangani Ketua dan di stempel)
2. Untuk mengisi dokumen pada lampiran 2,3,4,5,8 dan 9 jumlah PNBPN yang telah disetor ke kas Negara pada tahun 2016 dan 2017 harus sesuai dengan LRA Pendapatan yang ada pada SAIBA dan e-rekon dan untuk lampiran 1, 6 dan 7 diambil dari data pembukuan keuangan perkara perdata pada kepaniteraan satuan kerja masing-masing
3. Apabila ada sisa PNBPN yang belum disetor sampei dengan 31 Desember 2016 dan 2017 (akrual), satker harus mengirimkan dokumen sumber berupa bukti setor dan SSBPN baik untuk tahun 2016 disetor tahun 2017 maupun PNBPN tahun 2017 yang disetor tahun 2018.



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 91 /SEK/KU.00/02/2018  
Sifat : Penting  
Hal : Permintaan Dokumen

Jakarta, 12 Februari 2018

Yth.

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

di-

Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 02/LK-MA/02/2018 tanggal 9 Februari 2018 hal seperti pada pokok surat, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memenuhi permintaan dokumen tersebut. Dokumen yang kami butuhkan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP lainnya pada Pengadilan Tingkat Pertama (PN, PA, PTUN) dan Pengadilan Tingkat Banding (PT, PTA, PTTUN) yang berada dibawah Mahkamah Agung RI antara lain sebagaimana surat terlampir.

Dokumen tersebut kami harapkan dapat dikirimkan kepada Tim BPK melalui alamat email [LK.MA2017@bpk.go.id](mailto:LK.MA2017@bpk.go.id) dan [elly.rini@bpk.go.id](mailto:elly.rini@bpk.go.id) dengan tembusan ke Mahkamah Agung cq Bagian PNBP Biro Keuangan alamat email [keuangan.pnbp@yahoo.co.id](mailto:keuangan.pnbp@yahoo.co.id). Mengingat pentingnya dokumen tersebut dan keterbatasan waktu pemeriksaan, kami harapkan dokumen tersebut diterima paling lambat tanggal 21 Februari 2018.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Mahkamah Agung RI



Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, 9 Februari 2018

Nomor : 02 /LK-MA/02/2018  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permintaan Dokumen

Yth.  
Sekretaris Mahkamah Agung  
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2017 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas No. 8/ST/V-XVI.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018, kami membutuhkan dokumen terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara, dan PNBP lainnya pada pengadilan tingkat pertama (PN, PA, dan PTUN) dan pengadilan tingkat banding (PT, PTA, dan PTTUN) yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Dokumen yang kami butuhkan antara lain:

1. Laporan keadaan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding Tahun 2016 dan 2017, sesuai format terlampir (Lampiran 1);
2. Rincian keuangan perkara (biaya pendaftaran dan hak redaksi) di pengadilan tingkat pertama (gugatan, permohonan, eksekusi, banding, kasasi, peninjauan kembali) dan pengadilan tingkat banding Tahun 2016 dan 2017, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran Tahun 2016 yang belum disetor ke Kas Negara pada tahun 2016 (Lampiran 2);
  - b. Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran Tahun 2017 yang belum disetor ke Kas Negara pada tahun 2017 (Lampiran 3);
  - c. Jumlah PNBP Hak Redaksi Tahun 2016 yang belum disetor ke Kas Negara pada tahun 2016 (Lampiran 4);
  - d. Jumlah PNBP Hak Redaksi Tahun 2017 yang belum disetor ke Kas Negara pada tahun 2017 (Lampiran 5);
3. Rekapitulasi sisa panjar biaya perkara di pengadilan tingkat pertama yang belum dikembalikan kepada pihak yang berperkara/belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2017, sesuai format terlampir (Lampiran 6);
4. Total perkara eksekusi sampai dengan 31 Desember 2017 yang belum diperhitungkan sisa panjar biaya perkaranya dan belum dikembalikan ke pihak berperkara/ke kas negara, sesuai format terlampir (Lampiran 7);

5. PNBP lainnya di pengadilan tingkat pertama tahun 2016, namun disetorkan ke kas negara pada tahun 2017, sesuai format terlampir (Lampiran 8);
6. PNBP lainnya di pengadilan tingkat pertama tahun 2017, namun disetorkan ke kas negara pada tahun 2018, sesuai format terlampir (Lampiran 9).

Dokumen tersebut kami harapkan dapat dikirimkan kepada Ditjen terkait dan kemudian Ditjen terkait dapat menyerahkan kepada tim BPK melalui surat elektronik (surel) ke [LK.MA2017@bpk.go.id](mailto:LK.MA2017@bpk.go.id) dan [elly.rini@bpk.go.id](mailto:elly.rini@bpk.go.id) dengan tembusan ke Mahkamah Agung cq. Biro Keuangan. Mengingat pentingnya dokumen tersebut dan keterbatasan waktu pemeriksaan, kami harapkan dokumen tersebut dapat kami terima paling lambat hari Jumat tanggal 23 Februari 2018.

Demikianlah pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim,



Rici Ricarfi Kurnia  
NIP 19800613 200312 1 001

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
3. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung
4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5. Penanggung Jawab
6. Pengendali Teknis

## LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2016 DAN 2017

## Pengadilan Tingkat Pertama

No.	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
<b>A 2016</b>					
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)				
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama				
3	Eksekusi				
4	Perdata Tingkat Banding				
5	Perdata Tingkat Kasasi				
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali				
<b>B 2017</b>					
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)				
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama				
3	Eksekusi				
4	Perdata Tingkat Banding				
5	Perdata Tingkat Kasasi				
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali				

## Pengadilan Tingkat Banding

No.	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
<b>A 2016</b>					
1	Perdata Tingkat Banding				
<b>B 2017</b>					
1	Perdata Tingkat Banding				

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Februari 2018  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

NIP. \_\_\_\_\_

**RINCIAN KEUANGAN PERKARA (BIAYA PENDAFTARAN) TAHUN 2016 YANG BELUM DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2016**

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2016	Tarif PNBP Biaya Pendaftaran (Rp.)	Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran (Rp.)	Jumlah PNBP yang telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp.)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp.)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
3	Eksekusi						
4	Perdata Tingkat Banding						
5	Perdata Tingkat Kasasi						
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali						

....., Februari 2018  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....  
NIP.

**RINCIAN KEUANGAN PERKARA (BIAYA PENDAFTARAN) TAHUN 2017 YANG BELUM DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2017**

423 AIS

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2017	Tarif PNBP Biaya Pendaftaran (Rp.)	Jumlah PNBP Biaya Pendaftaran (Rp.)	Jumlah PNBP yang telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp.)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2018 (Rp.)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
3	Eksekusi						
4	Perdata Tingkat Banding						
5	Perdata Tingkat Kasasi						
6	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali						
JUMLAH							

\_\_\_\_\_, Februari 2018  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

\_\_\_\_\_  
NIP.

**RINCIAN KEUANGAN PERKARA (HAK REDAKSI) TAHUN 2016 YANG BELUM DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2016**

A23913

No.	Uraian	Jumlah Perkara Putus Tahun 2016	Tarif PNBP Hak Redaksi (Rp.)	Jumlah PNBP Hak Redaksi (Rp.)	Jumlah PNBP yang telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp.)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp.)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp.)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
JUMLAH							

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2016	Tarif PNBP Hak Redaksi (Rp.)	Jumlah PNBP Hak Redaksi (Rp.)	Jumlah PNBP yang telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp.)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp.)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp.)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Tingkat Banding						
JUMLAH							

....., Februari 2018  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

NIP. ....

**RINCIAN KEUANGAN PERKARA (HAK REDAKSI) TAHUN 2017 YANG BELUM DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2017**

No.	Uraian	Jumlah Perkara Putus Tahun 2017	Tarif PNBP Hak Redaksi (Rp.)	Jumlah PNBP Hak Redaksi (Rp.)	Jumlah PNBP yang telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp.)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp.)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2018 (Rp.)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)						
2	Perdata Permohonan Tingkat Pertama						
JUMLAH							

No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Didaftarkan Tahun 2017	Tarif PNBP Hak Redaksi (Rp.)	Jumlah PNBP Hak Redaksi (Rp.)	Jumlah PNBP yang telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp.)	Sisa PNBP yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp.)	Sisa PNBP yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2018 (Rp.)
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7=(5-6)	8
1	Perdata Tingkat Banding						
JUMLAH							

....., .. Februari 2018  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....  
NIP.

**SISA PANJAR BIAYA PERKARA YANG BELUM DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN/DISETORKAN  
KE KAS NEGARA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**

423A19

No.	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Jumlah Panjar Biaya Perkara (Rp.)	Pengeluaran Biaya Perkara (Rp.)	Sisa Panjar (Rp.)	Tanggal Pemberitahuan Adanya Sisa Panjar	Keterangan
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
...							
...							
JUMLAH							

\_\_\_\_\_, Februari 2018  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

\_\_\_\_\_  
NIP.

**DAFTAR PERKARA EKSEKUSI YANG BELUM DIPERHITUNGKAN SISA PANJAR BIAYANYA  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**

No.	Nomor Perkara	Jumlah Panjar Biaya Eksekusi (Rp.)	Pengeluaran Biaya Eksekusi (Rp.)	Jumlah Sisa Panjar (Rp.)	Tanggal Pemberitahuan Adanya Sisa Panjar	Keterangan
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
...						
...						
JUMLAH						

....., ..... Februari 2018  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

.....  
NIP.

## PNBP LAINNYA YANG DITERIMA DI TAHUN 2016 NAMUN DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2017

No.	Jenis PNBP	Tarif PNBP (Rp.)	Jumlah PNBP (Rp.)	Jumlah PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp.) <i>5=(3-4)</i>	Sisa PNBP Lainnya yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2016 (Rp.)	Sisa PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
...						
JUMLAH						

....., .. Februari 2018  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

NIP. ....

**PNBP LAINNYA YANG DITERIMA DI TAHUN 2017 NAMUN DISETORKAN KE KAS NEGARA TAHUN 2018**

No.	Jenis PNBP	Tarif PNBP (Rp.)	Jumlah PNBP (Rp.)	Jumlah PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp.) <i>5=(3-4)</i>	Sisa PNBP Lainnya yang Belum Disetor ke Kas Negara Tahun 2017 (Rp.)	Sisa PNBP Lainnya yang Telah Disetor ke Kas Negara Tahun 2018 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
...						
JUMLAH						

\_\_\_\_\_, Februari 2018  
Ketua PN/PA/PTUN/PT/PTA/PT TUN

NIP. \_\_\_\_\_